

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN

Shelva Edna Safitri¹, Nunuk Triwahyuningtyas², Sugianto³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: shelvasafitri@gmail.com, nunukwowo@gmail.com, sugianto@upnvj.ac.id

Abstrak

Kemiskinan adalah urusan esensial ekonomi yang sangat vital karena dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Subsidi pemerintah, produk domestik regional bruto (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPM) adalah faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kemiskinan. Penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan seluruh 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten dari tahun 2014 hingga 2020 sehingga total sampel sebanyak 56. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan berbagai publikasi Provinsi Banten dalam angka. Penelitian ini memerlukan teknik analisis regresi data panel dan alat yang dipakai untuk menganalisis penelitian ini adalah Eviews 10 dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) subsidi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten (2) PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten (3) IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.

Kata Kunci: kemiskinan, subsidi pemerintah, produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia.

Abstract

Poverty is an essential economic business that's very vital because it can reduce people's welfare in an area. Government subsidies, gross regional domestic product (GRDP), and human development index (HDI) are factors that can affect poverty. Determination of the sample using a saturated sampling technique with all 8 regencies/cities in the Province of the Banten from 2014 to 2020 so that the total sample is 56. The data need a secondary data obtained from the Central Statistics Agency and various prints of the Banten Province in figures. This research need panel data regression analysis techniques and the tools used to analyze this study Eviews 10 with a significance level of 5% (0.05) and also the selected model being the Fixed Effect Model (FEM). The results of this research show that (1) government subsidies has a significant effect on poverty levels in Banten Province (2) GRDP has a significant effect on poverty levels in Banten Province (3) HDI has not significant effect on poverty levels in Banten Province.

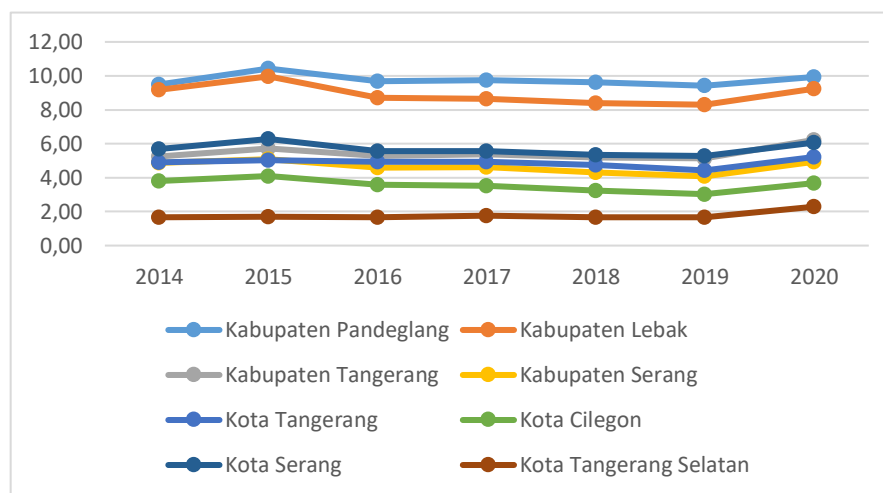
Keywords: povery, government subsidies, gross regional domestic product, human development index

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah permasalahan nasional yang terjadi di semua wilayah di Indonesia sebagai mana yang diungkapkan dalam buku yang dikarang oleh Keynes (1936), yang mengemukakan masalah kemiskinan muncul karena adanya paradoks masalah ekonomi bernama “*poverty in the midst of plenty*” yang artinya kemiskinan di tengah kelimpahan, dimana Keynes memungkinkan ketidakstabilan endogen dan melihat bahwa fungsi tak terkekang tenaga kerja dan pasar modal menanamkan kuat kecenderungan kliring pasar. Penekanan Keynes pada ketidakmampuan dari sistem untuk membuat penyesuaian otomatis menjadi penyebab ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan produksi permintaan masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan yang mendorong kelompok terpinggirkan.

Salah satu wilayah yang cukup tinggi tingkat kemiskinannya adalah Pulau Jawa. Sebanyak 12,56 juta penduduk miskin yang menghuni Pulau Jawa dengan jumlah persentase sebesar 8,29%, artinya setengah populasi penduduk miskin di Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Sementara untuk jumlah penduduk miskin terendah yaitu Pulau Kalimantan dengan jumlah 961,51 ribu orang, atau setara 5,81% (Badan Pusat Statistik, 2019). Pada Pulau Jawa terdapat provinsi termuda atau provinsi baru diantara provinsi lainnya yaitu provinsi Banten yang lokasinya berada di ujung barat Pulau Jawa yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Persentase tingkat kemiskinan cukup tinggi di Provinsi Banten, data statistik BPS Provinsi Banten menunjukkan bahwa setiap tahunnya tingkat kemiskinan memiliki persentase yang jauh berbeda pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten yang menandakan masih terjadi ketidakmerataan penduduk miskin, sehingga dapat dikatakan masih belum stabilnya pergerakan jumlah kemiskinan Provinsi Banten (Pradipta & Dewi, 2020).

Grafik 1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020 (Persen)



Sumber : BadanPusat Statistik, 2020

Grafik di atas menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2014-2020. Fenomena yang terdapat di Provinsi Banten ini adalah fluktuatifnya persentase penduduk miskin, terlihat dari masing-masing Kabupaten/Kota memiliki perbedaan persentase kemiskinan yang belum merata, dan sebagian besar perbedaan tersebut masih cukup tinggi. Perbedaan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten ini sangat terlihat, misalnya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang memiliki rata-rata persentase kemiskinan sangat tinggi hampir mendekati 10 persen dibandingkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki rata-rata persentase kemiskinan sangat rendah sekitar 1,78 persen yang berarti *range* nya kurang lebih 8 persen, dan tantangan yang harus dijalankan provinsi Banten ini adalah terhambatnya laju pengurangan persentase penduduk miskin di provinsi ini, terutama di perdesaan.

Secara keseluruhan, pada tahun 2015 kemiskinan di Provinsi Banten naik dengan persentase sebesar 5,90 persen lalu pada tahun 2016 turun sebesar 5,42 persen namun di tahun 2017 meningkat kembali walaupun tidak signifikan yaitu sebesar 5,45 persen. Faktor penyebab peningkatan kemiskinan ini adalah karena adanya inflasi umum yang pada September 2016-Maret 2017 sebesar 2,52 persen lebih tinggi dibandingkan pada Maret-September 2016 dengan inflasi umum sebesar 0,92 persen. Pada tahun 2018 kemiskinan dapat diturunkan hingga tahun 2019, kemudian di tahun 2020 kembali meningkat lagi mencapai 5,92 persen. Peristiwa ini terjadi karena merebaknya pandemi *Covid-19* yang telah menghambat seluruh jalannya sektor perekonomian sehingga banyak masyarakat yang dipecah karena perusahaan tidak mampu membayar gaji pegawai, dan berdampak pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin (Hidayat, et al., 2018).

Berbagai faktor dapat mempengaruhi kemiskinan, diantaranya adalah faktor subsidi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan subsidi pemerintah memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Adanya subsidi pemerintah ini sangat membantu masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan. Adanya subsidi pemerintah ini sangat penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang sangat berhubungan dengan kemiskinan. Hal ini merupakan bentuk sumbangsih pemerintah secara tidak langsung terhadap perekonomian. Dalam teori Keynes mengatakan bahwa subsidi pemerintah dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang berarti dapat menurunkan angka kemiskinan (Krugman, 2018).

Selain subsidi pemerintah, untuk menurunkan tingkat kemiskinan tentunya secara keseluruhan tidak lepas dari perkembangan perekonomian dimana salah satunya mampu diukur dari parameter produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan faktor untuk menunjukkan pengukuran kemiskinan dalam mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis suatu negara. Peningkatan PDRB merupakan syarat keharusan untuk mengurangi kemiskinan karena jika PDRB bertambah maka kemiskinan akan berkurang. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah indikator yang digunakan pada penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan tahun berjalan untuk mengamati kekuatan sumber daya ekonomi, perputaran, dan bentuk ekonomi suatu daerah (Pandita, 2021).

Komponen lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selain melihat dari subsidi pemerintah dan PDRB, dapat dilihat pula dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi yang kian meninggi akan menciptakan IPM yang baik dan bermutu tinggi, yang dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Rendahnya produktivitas dapat mengakibatkan tingginya angka kemiskinan, ini adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Tingkat IPM sendiri menjadi penentu atau tolak ukur kemampuan masyarakat untuk menyerap dan menggunakan segala aspek sumber pertumbuhan ekonomi mulai dari kelembagaan hingga berbasis teknologi. IPM didasarkan pada tiga dimensi yaitu tingkat harapan hidup saat lahir, tingkat melek huruf, tahun sekolah rata-rata, dan paritas daya beli (Juliannisa & Siswantini, 2020)

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini untuk menganalisis (1) bagaimana pengaruh subsidi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020? (2) bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020? (3) bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020? dengan tujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel subsidi pemerintah, PDRB, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten periode 2014-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kemiskinan

John Maynard Keynes (1936) mengatakan bahwa masalah kemiskinan muncul karena adanya paradoks masalah ekonomi bernama “poverty in the midst of plenty” yang artinya kemiskinan di tengah kelimpahan, dimana Keynes memungkinkan ketidakstabilan endogen dan melihat bahwa fungsi tak terkekang tenaga kerja dan pasar modal menanamkan kuat kecenderungan kliring pasar. Penekanan Keynes pada ketidakmampuan dari sistem untuk membuat penyesuaian otomatis menjadi penyebab ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan produksi permintaan masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan yang mendorong kelompok terpinggirkan (Rima, 2001).

Pada aliran Keynesian, program kesejahteraan dan *Welfare State* sangat mementingkan campur tangan pemerintah, hal ini dikarenakan peran pemerintah dalam mengatur serta mengarahkan kegiatan ekonomi baik dari skala kecil seperti individu-individu hingga skala menengah dan besar seperti firma-firma dalam memberikan subsidi pendapatan untuk menunjang kesejahteraan warga negaranya terbilang cukup besar. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa aliran ini melihat kesejahteraan sebagai sebuah bentuk timbal-balik atau sebab-akibat, dimana penentangan terhadap globalisasi merupakan akibat dari adanya ketimpangan pendistribusian pendapatan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan. Hal ini berarti kesenjangan pendapatan semakin melebar sehingga menimbulkan ketimpangan standar hidup yang melahirkan kelompok terpinggirkan (negara berkembang) dan secara ekonomi akan tertindas dan bergerak menghantam arus globalisasi (Krugman, 2018).

Teori Subsidi Pemerintah

Masalah esensial dari tingkat kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan-bantuan untuk kebutuhan hidup mereka, seperti bantuan untuk mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Di sini lah peran pemerintah memberikan kemudahan untuk masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan umum melalui pengeluarannya. Keynesian, dalam teorinya terkait subsidi pemerintah memaparkan untuk mengelola perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter peran pemerintah sangat penting sebagai instrumen utama penentu kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebagai upaya pencegahan intervensi negara, Keynes (1936) mengemukakan pembenahan

instabilitas perekonomian perlu dilakukan pemerintah. Apabila perekonomian mengalami ekuilibrium di bawah *full employment (recessionary gap)*, maka dilakukan dengan peningkatan permintaan yaitu pengeluaran belanja diperbanyak, pajak diturunkan, atau tingkat suku bunga diturunkan. Apabila perekonomian mengalami ekuilibrium di atas *full employment (inflationary gap)*, maka dilakukan dengan pengurangan permintaan yaitu suku bunga ditingkatkan, pajak ditingkatkan, atau belanja pemerintah diturunkan (Komalasari, 2015).

Teori Produk Domestik Regional Bruto

Teori pertumbuhan Keynes mengemukakan bahwa *aggregate demand (AD)* merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang merupakan permintaan disertai keahlian membayar permintaan jasa dan barang di dalam perekonomian. Permintaan jasa dan barang dalam *aggregate demand (AD)* dikendalikan oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor (perekonomian terbuka). Dengan persamaan:

$$Y = C + I + G + X - M \dots\dots\dots(1)$$

Teori Keynes sangat mengutamakan sisi permintaan agregat. Keynes dalam teorinya berpendapat investasi dapat menjadi jembatan penengah atau solusi alternatif apabila terjadi ketidakseimbangan antara konsumsi dan pendapatan akibat dari permintaan efektif yang tidak tercapai, sebab efek multiplier yang terdapat dalam peningkatan investasi akan turut serta meningkatkan pendapatan (Krugman, 2018).

Teori Indeks Pembangunan Manusia

Pemikiran J.M Keynes (1936) sebenarnya adalah penajaman atau kelanjutan dari hukum Say dari kritik Malthus. Keynes berpendapat bahwa besarnya depresi yang terjadi di tahun 1930-an disebabkan oleh permintaan agregat yang tidak mencukupi. Kurangnya permintaan ini menyebabkan kegiatan produksi terhambat bahkan jika masyarakat sebenarnya dapat melakukannya (banyak masyarakat yang menganggur). Secara ringkas salah satu implikasi kebijakan Keynes dapat digambar sebagai hubungan sebab-akibat yaitu jika kita ingin meningkatkan lapangan kerja, kita harus meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek. Jika peningkatan agregat berasal dari investasi maka permintaan penggandaan (multiplier) nya akan lebih besar, sehingga pada akhirnya bukan lagi penawaran yang menciptakan permintaan tetapi justru permintaan yang menciptakan penawaran itu sendiri (Andriyani, 2015).

Kaum keynesian meyakini bahwa keseimbangan diciptakan dari sistem perekonomian yang menjadikan mekanisme pasar sebagai kekuatan utama. Penggunaan sumber daya manusia secara maksimal (*fully employed*) dalam sudut pandang klasik yang bertentangan dengan sistem tenaga kerja tentu tidak akan tercapai karena adanya himpunan yang menaungi tenaga kerja dengan tujuan melindungi hak buruh dari penurunan pendapatan minimum atau upah (Neezasty, 2011).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Nonprobability Sampling* dengan jenis *Jenuh Sampling*, karena sampel yang diambil pada penelitian ini adalah dengan mengambil seluruh sampel yang ada di dalam penelitian ini (Sugiyono, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dan disediakan oleh pihak lain yang menjadi objek penelitian yaitu Badan Pusat Statistik.

Dalam menguji dan menganalisis pengaruh subsidi pemerintah, PDRB, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten, maka penelitian ini dilakukan dengan memakai teknik Analisis Regresi Data Panel dengan model *Fixed Effect Model* (FEM). Data penelitian yang digunakan ialah dalam bentuk data panel yaitu gabungan antara data *time series* (runun waktu) dengan *cross section* (data silang) dan dibantu oleh program Microsoft Excel 2013 serta perangkat lunak *Software Eviews 10*. Berikut ini adalah persamaan regresi data panel:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

- Y : Tingkat Kemiskinan
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi Variabel
- X_1 : Subsidi Pemerintah
- X_2 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- X_3 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- i : *Cross-section*
- t : *Time Series*
- e : *Error Term*

Metode persamaan dalam penelitian ini menggunakan logaritma berganda. Hasil regresi akan diubah ke dalam bentuk logaritma natural bertujuan untuk memperoleh satuan yang sama. Variabel dengan satuan ribu rupiah dan jutaan rupiah seperti pada variabel subsidi pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perlu ditransformasikan ke dalam bentuk satuan persen (%) (Ohyver, 2013). Persamaan di atas dapat ditransformasikan sehingga menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_{1it} + \beta_2 \text{Ln}X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

- Y : Tingkat Kemiskinan
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi Variabel
- $\text{Ln}X_1$: Log Natural Subsidi Pemerintah
- $\text{Ln}X_2$: Log Natural Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

- X_3 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
i : *Cross-section*
t : *Time Series*
e : *Error Term*

Agar model pada data penelitian dapat memenuhi syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) atau tidak bias, maka dilakukanlah uji asumsi klasik untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Umumnya uji asumsi klasik yang dilakukan yakni uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Winarno, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Model *Fixed Effect* diperlukan guna melihat kaitan antar variabel. Model ini telah terpilih dua kali yakni pada *chow test* dan *hausman test*, sehingga mampu ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga model (*common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*), *fixed effect model* lebih tepat dalam menafsirkan regresi data panel pada penelitian ini. Berikut ini hasil estimasi variabel subsidi pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten:

Tabel 1. Model *Fixed Effect* (FEM)

Variable	Coef ficient	Std. Error	t- Statistic	Pro b.
	30.5	7.015	4.350	0.00
C	2088	069	760	01
	-	0.035	-	0.01
LNSP	0.092045	805	2.570717	35
	-	0.802	-	0.00
LNPDRB	2.200609	063	2.743685	87
	0.21	0.129	1.665	0.10
IPM	5441	389	069	28

Sumber: Hasil Output Eviews 10

Hasil estimasi regresi data panel di atas menghasilkan nilai konstanta pada angka 30,52088 artinya jika variabel subsidi pemerintah, produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) dianggap konstan, maka menghasilkan tingkat kemiskinan sebesar 30,52088.

Koefisien regresi variabel subsidi pemerintah sebesar -0,092045 menandakan koefisien bernilai negatif yang artinya terdapat hubungan yang berbanding terbalik, jadi setiap kenaikan subsidi pemerintah sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar

-0,092045%. Hal ini mengartikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara subsidi pemerintah dengan tingkat kemiskinan.

Koefisien regresi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar -2,200609 menandakan koefisien bernilai negatif yang artinya terdapat hubungan yang berbanding terbalik, jadi setiap kenaikan PDRB sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -2,200609%. Hal ini mengartikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tingkat kemiskinan.

Koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,215441 menandakan koefisien bernilai positif yang artinya terdapat hubungan yang searah, jadi setiap kenaikan IPM sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,215441%. Hal ini mengartikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kemiskinan.

Uji Normalitas

Uji normalitas dibutuhkan untuk menilai apakah data yang diuji memiliki syarat kenormalan atau tidak. Uji Jarque-Bera (*JB Test*) digunakan dalam penelitian ini dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Jika probabilitas $JB > 5\%$ maka mampu dipastikan bahwa data telah mempunyai distribusi yang normal dan sebaliknya. Terlihat pada tabel di bawah ini hasil pengujian untuk uji normalitas:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	3.286370
Probability	0.193363

Sumber: Hasil Output Eviews 10

Pada uji normalitas di tabel atas tersebut diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $0,193363 > 0,05$ oleh karena itu dapat dipastikan bahwa residual terdistribusi normal sehingga memiliki artian tidak terdapat masalah normalitas dalam penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mempunyai capaian untuk memandang apakah model regresi didapati terindikasi hubungan yang tinggi antar variabel bebas. Pengujian dibutuhkan dengan memandang nilai korelasi diantara variabel bebas dengan menggunakan hubungan antar variabel bebas, apabila nilai korelasinya $< 0,8$ maka ditarik kesimpulan tidak terindikasi permasalahan multikolinearitas, demikian pula sebaliknya. Terlampir pada tabel di bawah ini hasil pengujian untuk uji multikolinearitas:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	Correlation		
	X1	X2	X3
LNSP	1.00000	0.144754	0.357045

LNPDRB	0.144754	1.00000	0.631845
IPM	0.357045	0.631845	1.00000

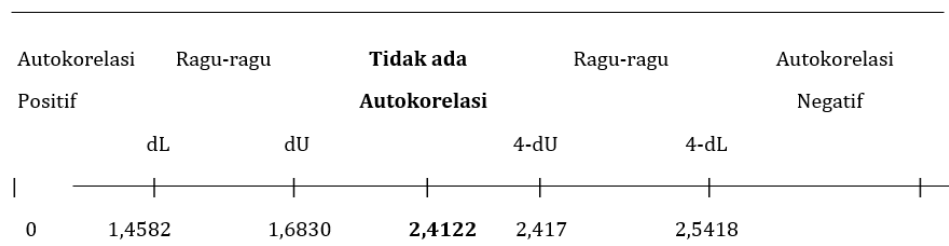
Sumber: Hasil Output Eviews 10

Dari hasil uji multikolinearitas di atas diperoleh nilai korelasi antar variabel independen $< 0,8$ yang artinya dapat dipastikan model ini tidak terjadi permasalahan multikolinearitas sehingga tidak perlu dilakukan transformasi dalam bentuk *Difference*.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi mempunyai tujuan untuk menimbang apakah pada model regresi ditemukan hubungan antar kesalahan pengganggu pada kurun ruang atau waktu dengan kesalahan ruang dan waktu sebelumnya. Pengujian autokorelasi dibutuhkan memakai uji Durbin-Watson (*DW test*). Gambar ini adalah gambar penyajian data panel memakai tabel Durbin-Watson:

Gambar 1. Hasil Uji Autokorelasi



Sumber: Hasil Olah Peneliti

Berdasarkan hasil olah gambar di atas, memperlihatkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,4122. Disimpulkan $n=56$ serta $k=4$, $dL=1,4582$ dan $dU=1,6830$. Oleh sebab itu dapat ditulis sebagai berikut:

$$DW = dU < d < 4-dU$$

$$DW = 1,6830 < 2,4122 < 2,417$$

Output tersebut menunjukkan kesesuaian dengan tabel Durbin-Watson, maka nilai uji Durbin-Watson mengambil keputusan terima H_0 yang berarti menerima bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas mempunyai maksud untuk menilai apakah dalam model residual ada ketidakcocokan satu varian residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Uji ini memakai metode *glejser*, apabila nilai masing-masing variabel bebas probabilitasnya $> 0,05$ maka dapat dipastikan tidak adanya masalah heteroskedastis pada model atau hasil data dalam keadaan homokedastis, dan juga sebaliknya. Tabel di bawah ini merupakan hasil uji heterokedastisitas:

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS	
Method: Panel Least Squares	
Variable	Prob.
C	0.9913
LNSP	0.6341
LNPDRB	0.9834
IPM	0.9383

Sumber: Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan pada hasil tabel uji heterokedastisitas di atas, didapati nilai probabilitas untuk setiap variabel bebas $> 0,05$ oleh karena itu sudah dipastikan bahwa tidak terindikasi permasalahan heterokedastisitas pada model regresi penelitian ini

Uji T

Uji T mempunyai capaian untuk memperoleh besarnya dominasi parsial dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada uji T ini keputusan diambil adalah melalui perbandingan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} dan juga dengan memperhatikan nilai probabilitas. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< \alpha$ (5%) maka variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai probabilitas $> \alpha$ (0.05), maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mendapatkan nilai t tabel pada penelitian ini diperoleh dengan rumus $=tinv(\alpha ; n-k)$ dimana α adalah alpha sebesar 0.05, n adalah total observasi, dan k adalah total variabel independen dan variabel dependen maka dicapai hasil $=tinv(0.05;56-4)$ dan nilai t_{tabel} adalah 2,00664.

Tabel 5. Hasil Uji T

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	4.350760	0.0001
LNSP	-2.570717	0.0135
LNPDRB	-2.743685	0.0087
IPM	1.665069	0.1028

Sumber: Hasil Output Eviews 10

Dari hasil regresi variabel subsidi pemerintah, diperoleh nilai $t_{hitung} (-2,570717) < t_{tabel}$ (2,00664). Nilai probabilitas variabel subsidi pemerintah sebesar 0,0135 kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0,0135 < 0,05$) maka secara statistik variabel subsidi pemerintah (LNSP) signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini mampu ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis nol (H_0) ditolak dalam artian variabel subsidi pemerintah memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan, oleh sebab itu Hipotesis satu (H_1) dinyatakan diterima.

Dari hasil regresi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diperoleh nilai $t_{hitung} (-2,743685) > t_{tabel} (2,00664)$. Nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0,0087 kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0,0087 < 0,05$) maka secara statistik variabel PDRB (LNPDORB) signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini mampu ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis nol (H_0) ditolak dalam artian variabel PDRB memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan, oleh sebab itu Hipotesis satu (H_2) dinyatakan diterima.

Dari hasil regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperoleh nilai $t_{hitung} (1,665069) < t_{tabel} (2,00664)$. Nilai probabilitas variabel IPM sebesar 0,1028 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0,1028 > 0,05$) maka secara statistik variabel IPM tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini mampu ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis nol (H_0) diterima dalam artian variabel IPM tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan, oleh sebab itu Hipotesis satu (H_3) dinyatakan ditolak.

Uji F

Uji F dibutuhkan untuk memperoleh dominasi variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen dan membuktikan model yang diteliti ini telah layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Uji ini dijalankan dengan mengandaikan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $p\text{-value} < \alpha 5\%$, hal ini terbukti signifikan dan sebaliknya. Nilai F_{tabel} didapat dengan memerlukan *Microsoft Excel* dengan rumus =FINV(α ;k-1;n-k) dimana α adalah alpha sebesar 0.05, n adalah total observasi, dan k adalah total variabel dependen dan variabel independen maka didapatkan hasil =FINV(0.05;4-1;56-4) dan nilai F_{tabel} adalah 2,7826.

Tabel 6. Hasil Uji F

F-statistic	305.9916
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Output Eviews 10

Menurut hasil regresi uji F di atas, didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 305,9916 dan F_{tabel} sebesar 2,7826 sehingga diperoleh hasil $F_{hitung} (305,9916) > F_{tabel} (2,7826)$ dengan probabilitas $0,000000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) dan secara statistik menunjukkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini yakni variabel subsidi pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersamaan signifikan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa kuat kejelasan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai yang hampir mengarah angka 1 berarti dalam menduga variabel terikat hampir seluruh informasi yang dibutuhkan telah dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Untuk regresi berganda digunakan *adjusted R-Squared* (R^2), yang diperlukan untuk mengetahui seberapa kuat variabel terikat dapat

diterangkan oleh variasi variabel bebas. Nilai *adjusted* R^2 yang semakin besar atau mendekati angka 1 maka kecocokan model regresi semakin benar atau semakin baik.

Tabel 7. Hasil Uji F

R-squared	0.985507
Adjusted R-squared	0.982286

Sumber: Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan pada hasil pengujian koefisien determinasi di atas dengan menggunakan model *fixed effect*, nilai R^2 sebesar 0,985507, yang mengartikan bahwa variabel terikat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas subsidi pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 98,55% dan sisanya sebesar 1,45% dapat diterangkan oleh variabel lain di luar model. Serta nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,982286 artinya variabel terikat kemiskinan diterangkan oleh variabel bebas yaitu subsidi pemerintah, PDRB, dan IPM sebesar 98,22% dan sisanya sebesar 1,78% diterangkan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak terpilih pada penelitian ini.

Pengaruh Subsidi Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect* pada tabel 1, didapat nilai t_{hitung} sebesar $-2,570717 > t_{tabel}$ sebesar $2,00664$ dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,0135$ yang menandakan variabel subsidi pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten periode 2014-2020, karena subsidi pemerintah cenderung menurun sementara kemiskinan cenderung meningkat. Kecenderungan menurunnya jumlah subsidi pemerintah ini dikarenakan belum optimalnya perekonomian di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten sehingga distribusi subsidi nya juga belum merata dan berfluktuatif naik turun yang akibatnya memicu pergolakan tingkat kemiskinan di tiap kabupaten/kota Provinsi Banten tersebut, karena antara subsidi pemerintah dengan tingkat kemiskinan memiliki hubungan negatif atau berbanding terbalik sehingga subsidi pemerintah dapat mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Banten.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mufliha, 2018) yang menerangkan subsidi pemerintah mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2013-2017 karena pendistribusian dana subsidi sangat membantu masyarakat kalangan bawah dalam memperoleh ekonomi yang lebih baik, walaupun masih tak terhitung masyarakat yang kaya menikmati bantuan dari pemerintah yang seharusnya bantuan tersebut dialokasikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Misdawita & Sari, 2013) bahwa subsidi pemerintah mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2001-2012, namun sebagian besar hanya dinikmati oleh kalangan ekonomi menengah ke atas dibandingkan masyarakat miskin sehingga berdampak signifikan bagi masyarakat kalangan atas tersebut.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect* pada tabel 1, didapat nilai t_{hitung} sebesar $-2,743685 > t_{tabel}$ sebesar $2,00664$ dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,0087$ yang menandakan bahwa variabel PDRB negatif mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Banten periode 2014-2020, karena PDRB selalu meningkat sementara kemiskinan juga cenderung meningkat. Meningkatnya jumlah PDRB ini dikarenakan nilai PDRB sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang meliputi sumber daya, diantaranya sumber daya alam atau sumber daya manusia dan juga faktor produksi yang tersedia. Pesatnya pembangunan industri menjadikan Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi yang mempunyai total industri terbanyak di Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten akan mengalami penurunan ketika terjadi pertumbuhan ekonomi. Ketika PDRB naik, maka kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar semakin baik, dengan begitu kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat.

Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan Todaro (2009) bahwa pertumbuhan PDRB adalah kriteria yang selalu dipakai untuk melihat seberapa jauh kemakmuran ekonomis suatu negara. Semakin besar tingkat pendapatan per kapita maka kemampuan daya beli seseorang akan meningkat juga sehingga tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2012), menyatakan bahwa PDRB yang meningkat akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 yang penelitiannya membuktikan PDRB mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, karena nilai PDRB yang tinggi membuktikan keahlian sumber daya ekonomi yang tinggi juga. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Amanda, 2017), menyatakan bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang besar dalam memecahkan permasalahan kemiskinan di Provinsi DIY periode 2009-2016 yang mana hasil penelitiannya membuktikan PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect* pada tabel 1, didapat nilai t_{hitung} sebesar $1,665069 > t_{tabel}$ sebesar $2,00664$ dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,1028$ yang menandakan bahwa variabel IPM tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten periode 2014-2020. Hasil ini tidak sesuai dengan pendugaan sementara dimana indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten yang disebabkan rendahnya sumber daya manusia di Provinsi Banten karena kurangnya keterampilan dan pendidikan di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten, sehingga walaupun IPM nya meningkat namun peningkatannya melambat karena ada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten yang memiliki nilai IPM rendah bila dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal tersebut tercermin dalam beberapa data sampel di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel 8. IPM dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2016-2017

Kab/Kota	Tahun	IPM (Persen)	Kemiskinan (Persen)
Kabupaten Pandeglang	2016	63.4	9.67
	2017	63.82	9.74
Kabupaten Tangerang	2016	70.44	5.29
	2017	70.97	5.39
Kabupaten Serang	2016	65.12	4.58
	2017	65.6	4.63
Kota Tangerang	2016	76.81	4.94
	2017	77.01	4.95
Kota Tangerang Selatan	2016	80.11	1.67
	2017	80.84	1.76

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan data, terlihat bahwa terdapat fenomena yang tidak sesuai dengan teori Keynes, dimana IPM Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yang tadinya sebesar 63,40 persen tahun 2016 menjadi 63,82 persen tahun 2017, namun pada waktu yang bersamaan tingkat kemiskinan Kabupaten Pandeglang justru mengalami peningkatan juga yang tadinya sebesar 9,67 persen tahun 2016 menjadi 9,74 persen tahun 2017. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Adanya temuan fenomena di Provinsi Banten ini tentunya bertentangan dengan teori J.M Keynes (1936) yang mengatakan bahwa employment meningkat apabila permintaan meningkat dan tersedia jika kapasitas produksi terpenuhi, kapasitas ini berkaitan dengan modal manusia dan fisik. Secara tidak langsung ini menandakan bahwa IPM berpengaruh terhadap kemiskinan dan memiliki pengaruh negatif namun dalam penelitian ini memiliki hasil penelitian yang berbanding terbaik (Andriyani, 2015)

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Anandanisa, 2018) yang membuktikan IPM tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan kemiskinan di Provinsi Papua periode 2011-2015 dikarenakan kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Hasil ini juga menunjukkan persamaan dengan riset yang ditunjukkan (Susilowati & Suliswanto, 2015) yang hasil penelitiannya menyatakan tidak ada hubungan antara variabel IPM dengan kemiskinan di Indonesia.

SIMPULAN

Terdapat pengaruh yang signifikan antara subsidi pemerintah dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Kondisi ini sesuai dengan model penelitian dan hasil uji secara statistik dimana penyaluran dana subsidi sangat membantu masyarakat kalangan

bawah dalam memperoleh ekonomi yang lebih baik, walaupun terdapat tak terhingga masyarakat yang kaya menikmati bantuan dari pemerintah yang seharusnya bantuan tersebut dialokasikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Terdapat pengaruh yang signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Kondisi ini sesuai dengan model penelitian dan hasil uji secara statistik dikarenakan nilai PDRB sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang meliputi sumber daya, antara lain sumber daya alam atau sumber daya manusia dan juga faktor produksi yang ada. Ketika PDRB naik, maka kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar semakin baik, dengan begitu kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat.

Tidak terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Hasil ini bertentangan dengan model penelitian dimana seharusnya IPM menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena rendahnya sumber daya manusia di Provinsi Banten sehingga kurangnya keterampilan dan pendidikan di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten, dan terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten yang buta aksara, salah satunya adalah Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, K., 2017. The Analysis of Factors Affecting Poverty In The Special Region of Yogyakarta Province 2009-2016. Economics.
- Anandanisa, N. P., 2018. Analisis Kemiskinan di Provinsi Papua. Universitas Islam Indonesia.
- Andriyani, D., 2015. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Ekonomi, p. 6.
- Hidayat, T. et al., 2018. Kajian Fiskal Regional Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi Banten, s.l.: s.n.
- Badan Pusat Statistik, 2019. bps.go.id. [Online]
Available at: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>
- Juliannisa, I. A. & Siswantini, T., 2020. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Manusia (IPM) melalui Pemberantasan Buta Aksara (Studi Kasus pada Desa Cibadak). Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Volume Vol 11 No.1, p. 30.
- Komalasari, P., 2015. Keynes and The Classical Economists "The Early Debate on Policy Activism". [Online]
Available at:
http://wps.aw.com/wps/media/objects/11/11640/rohlf_keynes_and_classical.pdf
- Krugman, P., 2018. The General of Theory Employment, Interest, and Money. In: The General Theory. s.l.:s.n., p. 27.
- Misdawita & Sari, A., 2013. Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume Vol. 4 No.2, pp. 147-161.

- Mufliha, N. M., 2018. Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Subsidi Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2013-2017. *Ekonomi*.
- Neezasty, 2011. Teori-teori Ekonomi SDM.
- Ohyver, M., 2013. Penerapan Metode Transformasi Logaritma Natural dan Partial Least Squares Untuk Memperoleh Model Bebas Multikolinearitas dan Outlier. *Jurnal Mat Stat*, Volume Vol.13 No.1, pp. 42-51.
- Pandita, G., 2021. *jojonomic.com*. [Online]
Available at: <https://www-jojonomic-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.jojonomic.com/blog/produk-domestik-regional-bruto.html>
[Accessed 25 Februari 2021].
- Pradipta, S. & Dewi, R., 2020. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan. *JUPE*, Volume 08 Nomor 03, pp. 109-115.
- Rima, I. H., 2001. *Development of Economic Analysis Sixth Edition*. London and New York: Taylor & Francis Group.
- Saputra, 2012. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Ekonomi*.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, D. & Suliswanto, M., 2015. Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri dan Kemiskinan (Kajian Teoritis di Indonesia). *Journal of Innovation in Business and Economics*, Volume 06 No.1, p. 89.
- Todaro, M., 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kelima. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, W. W., 2015. *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews*. s.l.:UPP STIM YKPN.